

**EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MAKASSAR**

EVALUASI RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Makassar melaksanakan 4 program dengan jumlah keseluruhan kegiatan yakni sebanyak 20 kegiatan yang terbagi ke dalam 66 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH & KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program ini terdiri 4 (empat) Kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Fasilitasi Kerjasama Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari sub kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan pada triwulan II didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 281.524.200,00 dengan realisasi anggaran Rp 69.240.000,00 atau 24,59%. Rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 sub kegiatan.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Kota Makassar selama Triwulan II Tahun 2023 yaitu:

1. Belanja alat / bahan untuk kegiatan seperti Alat Tulis Kantor, belanja Kertas dan Cover serta belanja bahan Komputer harus dilakukan melalui e-katalog dan belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga masih diperlukan proses penyesuaian terkait persyaratan dan tata cara dalam hal belanja e-katalog.
 2. Belanja Jasa tenaga administrasi yang belum terealisasi yaitu belanja iuran Jaminan Kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan iuran Jaminan Kematian.
- b. Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan pada triwulan II didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.256.149.500,00 dengan realisasi anggaran Rp 698.200.000,00 atau 16,40%. Rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan terdiri dari 5 sub kegiatan. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kota Makassar selama Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:
 1. Belanja alat / bahan untuk kegiatan seperti Alat Tulis Kantor, belanja Kertas dan Cover serta belanja bahan Komputer harus dilakukan melalui e-katalog dan belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga masih diperlukan proses penyesuaian terkait persyaratan dan tata cara dalam hal belanja e-katalog.
 2. Belanja Jasa tenaga administrasi yang belum terealisasi yaitu belanja iuran Jaminan Kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan iuran Jaminan Kematian.
 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transpor Pakandatto). Belum terbayar untuk semua kecamatan.
 4. Sebagian kegiatan sudah terlaksana akan tetapi proses pencairan anggarannya masih sementara berproses.

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah pada triwulan II didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.133.555.800,00 dengan realisasi anggaran Rp 2.509.367.238,00 atau 60,71%. Rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori sedang.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Makassar selama Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belanja alat / bahan untuk kegiatan seperti Alat Tulis Kantor, belanja Kertas dan Cover serta belanja bahan Komputer harus dilakukan melalui e-katalog dan belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga masih diperlukan proses penyesuaian terkait persyaratan dan tata cara dalam hal belanja e-katalog.
2. Belanja Jasa tenaga administrasi yang belum terealisasi yaitu belanja iuran Jaminan Kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan iuran Jaminan Kematian.
3. Sebagian anggaran pada kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah tidak dapat terealisasi karena adanya kesalahan dalam proses Check Out belanja barang melalui e-katalog.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari sub kegiatan :

- a . Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 59.800.360.400 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 28.063.002.680. dengan realisasi fisik dari 22 kegiatan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat berakhirnya triwulan II telah ada 12 kegiatan yang terselesaikan sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 46.93% dan realisasi keuangan sebesar 46.93%.
- b . Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 556.359.700 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 90.990.000 dengan realisasi fisik dari 5 Kebijakan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini telah ada kebijakan yang terselesaikan sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga akhir bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 16.35% dan realisasi keuangan sebesar 16.35%.
- c . Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 493.316.200 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 67.500.000 dengan realisasi fisik dari 5 Kebijakan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini telah ada kebijakan yang terselesaikan sehingga untuk sub kegiatan sampai saat ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 13.68% dan realisasi keuangan sebesar 13.68%.

Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yakni Ketersediaan dana dan melaksanakan visi misi Walikota yaitu : penguatan keimanan umat, di sisi lain adapun faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini yakni Terkendala pada proses pengadaan barang dan jasa serta pengelola keuangan yang kualitas SDMnya diindikasikan belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.

3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum

- a. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.287.807.200,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 392.402.179,- dengan realisasi kinerja dari 120 dokumen yang ditargetkan sampai triwulan kedua sebanyak 8 dokumen tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 8.00% dan realisasi keuangan sebesar 30.47%.

Adapun faktor pendukung dalam Kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum daerah adanya kerjasama dengan unsur Tenaga Ahli Selaku Narasumber, SKPD terkait selaku pengusul dan Percepatan Fasilitas di Biro Hukum Pemrov Sul-Sel dan Harmonisasi Di Kementrian Hukum dan Ham Sul-Sel, sehingga proses tetap berjalan. Faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini untuk target 120 dokumen belum dapat terpenuhi, untuk saat ini sebanyak 8 dokumen dan semuanya sudah terealisasi dan tindaklanjut yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif. Dari beberapa usulan dari SKPD ke Bagian Hukum untuk difasilitasi.

- b. Fasilitas Bantuan Hukum, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.291.960.100,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 377.286.504,- dengan realisasi kinerja dari 12 kasus yang ditargetkan untuk sampai triwulan kedua sebanyak 3 kasus tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 25,00% dan realisasi keuangan sebesar 16.46%.

Adapun faktor pendukung dalam Kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara adanya kerjasama dengan unsur Advokasi sebagai tim narasumber dan unsur dari pihak tim ahli dalam setiap penanganan perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar dan dengan berkolaborasi bersama SKPD terkait, sehingga proses kegiatan tetap berjalan. Di sisi lain, Faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah kurangnya berkas dan bukti pendukung dalam penanganan kasus, Dan tindaklanjut yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif.

- c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 936.620.000,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 248.470.777,- dengan realisasi kinerja dari 120 dokumen yang ditargetkan untuk sampai triwulan kedua sebanyak 8 dokumen sampai berakhirnya tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 6.67 % dan realisasi keuangan sebesar 25.53%.

Adapun faktor pendukung dalam Kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan rapat, proses penyebaran Produk Hukum dan kegiatan tetap berjalan. Di sisi lain, Faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah kurangnya berkas dan bukti pendukung dalam penanganan kasus, Dan tindaklanjut yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif.

4. Fasilitas Kerjasama Daerah

- a. Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri, yang didukung dengan anggaran sebesar **Rp.8.136.733.900,-** sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar **Rp.417.058.423,-** dengan realisasi fisik dari 20 Dokumen Kerjasama yang ditargetkan sampai akhir tahun 2023 telah tercapai 32 Dokumen Kerjasama tahun 2023, yaitu :
1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Makassar tentang Sinergi Perluasan Cakupan Kepesertaan, Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun Anggaran 2023 tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 4. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Cokroaminoto Makassar tentang Praktik Klinik Kebidanan;
 5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Lamappapoleonro tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Bone tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Buq'atun Mubarakah Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar dan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Imam Ashim dan Yayasan Serambi Madinah Indonesia (Yasmin) dan Yayasan Markas Imam Malik Tentang Pembinaan Penghafal AlQur'an Di Kota Makassar;
 8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Makassar;
 9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Univeristas Kristen Indonesia Paulus tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Univeristas Kristen Indonesia Toraja tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

14. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
15. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia tentang Praktek Kerja Profesi Program Studi S1 Farmasi dan Profesi Apoteker;
16. Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kota Makassar dengan Oriental Consultants Global Co., Ltd. pada Proyek Kelistrikan dan Rantai Dingin Industri Perikanan di Pulau Terpencil di Makassar;
17. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin tentang Praktik Kerja Lapangan;
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Andi Djemma Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Agama Islam Negeri Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Cokroaminoto Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
23. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Mega Buana Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
24. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
25. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Akademi Maritim Palopo Tentang Pelaksanaan Studium Generale "Smart City & Metaverse;
26. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Akademi Keperawatan Sawerigading Pemda Luwu Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
27. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
29. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar tentang Kerja Sama program Pendataan dan Pengembangan UKM di Lorong Wisata, Badan Usaha Lorong dan Koperasi, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (PKM) serta Pemberian Beasiswa Prestasi bagi Anak – Anak yang Domisili di Lorong Wisata;

30. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Program Studi Magister (S.2) Sosiologi Fisip Universitas Hasanuddin tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;

31. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar tentang Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;

32. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Pancasakti Makassar tentang Pelaksanaan Praktek Klinik Keperawatan;

Pada Triwulan II terdapat pergeseran anggaran (Parsial) yang berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (RAKERNAS APEKSI) ke-XVI di Kota Makassar yaitu :

1. Penambahan anggaran pada :

a) Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ballpoint, binder clips, notes, ID Card, cetak buku dan cetak undangan + sampul);

b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, (Goody Bag);

c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Baliho, Passappu/Ikat Kepala, dan backdrop Rakernas APEKSI dan Gala Dinner);

d) Belanja Pakaian Batik Tradisional (Pakaian Batik Tradisional Walikota/Wakil Walikota dan pasangan);

e) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada acara Rakernas APEKSI dan Gala Dinner

f) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

g) Belanja Sewa Peralatan Studio, Video dan Film

h) Belanja Sewa Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya

2. Pengurangan anggaran pada:

a) Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO)

b) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

c) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan

d) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

f) Belanja Sewa Hotel

g) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

h) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

b. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, yang didukung dengan anggaran sebesar **Rp.4.137.353.400,-** sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar **Rp.151.570.088,-** dengan realisasi fisik dari 2 Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang ditargetkan sampai akhir tahun 2023 terdapat 1 dokumen kerja sama luar negeri dalam proses penyusunan. Pada Triwulan II terdapat pergeseran anggaran (Parsial) yang berhubungan dengan pelaksanaan ASEAN Architect Congress di Kota Makassar yaitu :

1. Penambahan anggaran pada :
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, (Goody Bag);
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Passappu/Ikat Kepala, ID Card dan backdrop);
 - c) Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - d) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
 - e) Belanja Sewa Peralatan Bermotor Penumpang
 - f) Belanja Sewa Peralatan Studio, Video dan Film
 - g) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
 - h) Belanja Sewa Hotel
2. Pengurangan anggaran pada:
 - a) Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - b) Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - c) Belanja Jasa Penyelenggara Acara
 - d) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- c. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, yang didukung dengan anggaran sebesar **Rp.754.988.100,-** sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar **Rp.100.300.000,-**. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi keuangan sebesar 13.28%.

Adapun faktor pendukung dari Kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang cukup, kerjasama pimpinan dan staf yang efektif serta koordinasi yang intensif dengan calon mitra/mitra kerjasama dan stakeholder lainnya. Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program ini terdiri 3 (Tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian serta Pengelolaan Barang & Jasa. Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- a. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah indikator sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen, akan tetapi penginputan pada tabel ini mengikuti target dan indikator pada renstra yaitu jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi dengan target 1 dokumen. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.143.773.500,- Saat ini masih dalam proses pencairan dokumen pertanggungjawaban belanja sebesar Rp. 59.278.000,- atau

sebesar 2,77%. Target realisasi kinerja yang direncanakan adalah 2 dokumen yaitu dokumen pelaksanaan program TSLP dan dokumen evaluasi program pembangunan. Telah terealisasi 1 Dokumen evaluasi program . Namun, dokumen pelaksanaan program TSLP belum terlaksana disebabkan belum rampungnya SK Tim Dewan TSLP.

- b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 463.975.600,- telah terealisasi sebesar Rp 113.589.200,- atau sebesar 24,48%. Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah indikator subkegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan target 4 dokumen, sedangkan target pada renstra adalah 1 dokumen yang mencakup 1 tahun laporan monitoring DAK selama 4 triwulan. Monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus telah dilaksanakan sampai pada triwulan II.
- c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 454.566.600,- telah terealisasi sebesar Rp 102.208.300,- atau sebesar 22,48%. Target kinerja yang direncanakan adalah 12 laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, dalam tabel ini diinput berdasarkan data renstra yaitu persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi sismonteptra tepat waktu dengan target 100% Adapun pelaporan monitoring realisasi keuangan dan fisik APBD kota Makassar telah terlaksana hingga bulan Juni, sehingga realisasi target kinerja sampai dengan triwulan II adalah 6 laporan.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja dari Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan ini adalah koordinasi-koordinasi yang intensif dengan perangkat-perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

Adapun faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini, khususnya pada subkegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan adalah lambatnya penerbitan Perwali TSLP dan belum rampungnya SK Tim Dewan TSLP. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang ada mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.160.532.000,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi anggaran keuangan sebesar Rp 184.697.544,- dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai akhir Juni 2023 sampai saat ini sebesar Rp. 280.309.194,- 8,87% dan realisasi keuangan sebesar 5,84%.

- b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 626.353.400,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi Anggaran keuangan sebesar Rp 95.717.800,- dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, kegiatan realisasi fisik sebesar Rp. 146.674.300,- 23,42% dan realisasi keuangan sebesar 15,28%.
- c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 690.053.000,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi Anggaran keuangan sebesar Rp 124.785.500,- dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai akhir tahun 2023, sebesar Rp. 194.851.550,- sebesar 28,24% dan realisasi keuangan sebesar 18,08%.

Adapun faktor pendukung dari program ini adalah koordinasi dan komunikasi dengan BUMD/BLUD dan stakeholder lainnya yang terjalin dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dari pencapaian program ini adalah Keterlambatan pencairan anggaran serta adanya restrukturisasi/pergantian pejabat lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar. Faktor penghambat lainnya adalah dimana masih menunggu progress tentang pembentukan Makassar incorporate yang sedang berjalan, sebagaimana kita ketahui salah satu program prioritas pemerintahan kota yang penganggarnya cukup besar. Masih terbatasnya jumlah pegawai yang malakukan tugas tugas kedinasan yaitu dalam rangka penyelenggaraan pengawasan usaha mikro, perdagangan serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD dan BLUD. Dan tindak lanjut yang disarankan yakni agar pencairan dana kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal guna mengoptimisasi pencapaian target dan realisasi perencanaan serta mendayagunakan sumber daya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Pengelolaan Barang dan Jasa

- a. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.395.948.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni sebesar Rp 836.432.450 ,-atau sebesar 34,91 %, dengan target kinerja yaitu Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilayani sebanyak 200 paket selama 1 tahun dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2023 yaitu sebanyak 50 paket yang telah dilayani dengan capaian kinerja sebesar 25 %.
- b. Pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik yang didukung oleh anggaran sebesar Rp1.703.506.400 ,- dengan realisasi keuangan samapai bulan Juni 2023 sebesar Rp436.076.400,- atau sebesar 25,60%. Dengan target kinerja yaitu Jumlah Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Dilaksanakan sebanyak 7 fungsi layanan dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2023 sudah dilaksanakan sebanyak 5 fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ,dengan capaian kinerja sebesar 71,42 %.
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung oleh anggaran sebesar Rp1.900.000.800,- dengan realisasi keuangan sampai bulan Juni 2023 sebesar

Rp652.694.200,- atau sebesar 34,35 % Dengan target kinerja pertama yaitu Jumlah bimbingan teknis / Sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 6 Bimtek dengan realisasi capaian sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 6 bimtek telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan target kinerja kedua yaitu Jumlah SKPD Yang meminta untuk mendapatkan Pendampingan Pengadaan Barang/jasa sebanyak 15 SKPD dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2023 ada 17 SKPD yang telah mendapatkan pendampingan dalam hal pengadaan barang/jasa dengan capaian kinerja sebesar 113%.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang cukup serta terencana dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tersusun dengan baik. Dengan didukung oleh sumber daya Pegawai yang cukup tersedia.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah adanya alokasi anggaran yang belum terealisasi dikarenakan menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri 12 (duabelas) Kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) unit kerja yang ada pada sekretariat daerah serta dijabarkan ke dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Fasilitasi Keprotokolan, Jumlah pelayanan Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar yang Mendapat Layanan Keprotokoleran dengan target 100% Untuk Triwulan I Tahun 2023 Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.890.143.120 dengan realisasi sebesar Rp. 4.104.046.740 atau 31,84%. Fasilitasi Keprotokolan memiliki indikator kinerja, yaitu Jumlah Pelayanan Fasilitasi Keperotokoleran Pemerintah Kota Makassar yang Mendapat Layanan Keprotokoleran dengan Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 39,64% dengan predikat sangat rendah.
- b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan target 100% Untuk Triwulan II Tahun 2023 Pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 442.470.700 dengan realisasi sebesar Rp. 210.900.000 atau 45,24%. Rata2 capaian kinerja 36,25% dengan predikat sangat rendah.
- c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan, Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan target 100% Untuk Triwulan II Tahun 2023 Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.231.286.800 dengan realisasi sebesar Rp. 3.398.505.000 atau 33,22%. Rata2 capaian kinerja 40,42% dengan predikat sangat rendah. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan kegiatan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar selama Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut: Masih berjalan berkas pencairan belanja perjalanan dinas pada sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan serta belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan pada sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan khususnya kerjasama dengan Media.

Adapun faktor pendukung terhadap capaian realisasi selama Triwulan II adalah kerjasama Pimpinan dan Staf yang tetap efektif dalam menjalankan Pelayanan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan.

Tindak lanjut yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat Proses Pemberkasan untuk Pencairan
2. Mengusahakan percepatan penyelesaian anggaran untuk belanja lainnya.

Jadi rata-rata capaian kinerja dan anggaran Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar selama triwulan II tahun 2023 yaitu:

- ❖ Capaian Kinerja : 38,77%
- ❖ Capaian Anggaran : 32,69%
- ❖ Predikat kinerja : Sangat Rendah

2. Penataan Organisasi

- a. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp690.601.800,- Dari Bulan April sampai Bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp108.559.462,- dengan realisasi kinerja dari 5 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya Tahun 2023. Sampai saat ini dokumen yang dilaksanakan yaitu Perda Perangkat Daerah; Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Peta Jabatan; Informasi Struktur Jabatan; dan Laporan Kegiatan Evaluasi Kelembagaan, terealisasi 1 dokumen dan lainnya masih dalam bentuk draft. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga Bulan Juni Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen atau sebesar 20% dan realisasi keuangan sebesar Rp108.559.462,- atau 15,72%.
- b. Program Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp1.526.698.900,- Dari Bulan April sampai Bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp359.230.485,- dengan realisasi kinerja dari 5 laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya Tahun 2023. Sampai saat ini ada 2 laporan yang terlaksana di triwulan I dan 1 laporan yang terlaksana di triwulan II. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga Bulan Juni Tahun 2023 sebanyak 3 laporan atau sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp359.230.485,- atau 23,53%.
- c. Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp714.374.100,- dari Bulan April sampai Bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 128.639.200,- dengan realisasi fisik dari 2 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya Tahun 2023. Sampai saat ini dokumen yang terlaksana yaitu: Laporan LKJIP dan Laporan Kegiatan Fasilitasi LKJIP SKPD, yang terlaksana 1 dokumen dan yang lainnya masih dalam bentuk draft. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga Bulan Juni Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen atau sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp128.639.200,- atau 18,01%.

Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini adalah proses pelaksanaan kegiatan tetap terlaksana. Adapun faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah:

- data dari SKPD yang terlambat;
- data perencanaan di SKPD- SKPD yang masih belum sinkron;
- waktu untuk coaching inovator yang terbatas;
- dan SKPD masih kurang perhatian untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Tindak lanjut yang disarankan yaitu:

- permintaan data dilakukan secara terus menerus;
- mengadakan asistensi tingkat SKPD terkait sinkronisasi perencanaan dan pelaporannya;
- mengadakan coaching ke inovator yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- serta berupaya agar pemenang inovator tingkat nasional mendapatkan reward dari pimpinan.

3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 226.586.200, yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 68.096.090 dengan realisasi fisik dari 2 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 1 Dokumen telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 30.05%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA - SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 31.632.500 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 0 dengan realisasi fisik dari 50 rangkap dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 0 Dokumen belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 23.945.500 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 2.400.000 dengan realisasi fisik dari 25 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 15 Dokumen telah ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar 10.02%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 26.246.300 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 6.395.000 dengan realisasi fisik dari 3 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 2 Dokumen telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar

66.67% dan realisasi keuangan sebesar 24.37%.

- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 40.928.500 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 2.400.000 dengan realisasi fisik dari 4 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 2 Laporan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 5.86%.

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp42.912.530.387, yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 13.744.774.143 dengan realisasi fisik dari 14 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 7 Bulan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 32.03%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.586.465.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 964.021.601 dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 6 Bulan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 37.27%.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 908.163.600 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 306.745.537 dengan realisasi fisik dari 10000 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 1256 dokumen telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 17.42% dan realisasi keuangan sebesar 33.78%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 32.255.200 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 0 dengan realisasi fisik dari 5 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 5 Laporan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 220.721.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 0 dengan realisasi fisik dari 4 Kegiatan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 2 Kegiatan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 287.248.700 yang telah terealisasi sampai

bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 36.000.000 dengan realisasi fisik dari 12 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 6 Laporan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 12.53%.

5. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 184.128.720, yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 100.957.184 dengan realisasi fisik dari 14 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 7 Bulan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 42.86% dan realisasi keuangan sebesar 54.83%.
- b. Pelaksanaan Media Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000, yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 0 dengan realisasi fisik dari 8 Orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 8 Orang belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
- c. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.200.000.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 826.722.000 dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 6 Bulan telah terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 25.84%.

6. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.524.840.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 421.500.000 dengan realisasi fisik dari 1 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 27.64% dan realisasi keuangan sebesar 27.64%.
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 5.332.142.100 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 1.626.231.300 dengan realisasi fisik dari 4 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 30.50% dan realisasi keuangan sebesar 30.50%.

7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.559.850.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 681.660.000 dengan realisasi fisik dari 2192 Stel/Pasang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 2192 Stel/Pasang belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 26.63% dan realisasi keuangan sebesar 26.63%.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.884.000.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 356.552.160 dengan realisasi fisik dari 120 Orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 120 Orang belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 18.93% dan realisasi keuangan sebesar 18.93%.

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.151.049.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 391.312.530 dengan realisasi fisik dari 36 Jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 36 Jenis belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 34.00% dan realisasi keuangan sebesar 34.00%.
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 612.000.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 87.480.000 dengan realisasi fisik dari 2112 Exemplar yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 2112 Exemplar belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 14.29% dan realisasi keuangan sebesar 14.29%.
- c. Fasilitas Kunjungan Tamu, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 17.636.000.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 5.777.337.273 dengan realisasi fisik dari 200 Kunjungan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 200 Kunjungan belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 32.76% dan realisasi keuangan sebesar 32.76%.
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.650.000.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 101.924.283 dengan realisasi fisik dari 141 Perjalanan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 141 Perjalanan belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 2.79% dan realisasi keuangan sebesar 2.79%

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 30.299.740.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 3.763.600.000 dengan realisasi fisik dari 100% yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 12.42% dan realisasi keuangan sebesar 12.42%.
- b. Pengadaan Mebel, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.436.124.500 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 617.576.760 dengan realisasi fisik dari 10 Jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 10 Jenis belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 43.00% dan realisasi keuangan sebesar 43.00%.
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 10.918.898.363 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 773.085.500 dengan realisasi fisik dari 17 Jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 17 Jenis belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 7.08% dan realisasi keuangan sebesar 7.08%.

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 378.000.000 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 137.500.000 dengan realisasi fisik dari 10500 Surat yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 10500 Surat belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 36.38% dan realisasi keuangan sebesar 36.38%.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.084.161.424, yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 1.998.693.571 dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 12 Bulan belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 32.85% dan realisasi keuangan sebesar 32.85%.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 21.372.014.500 yang telah terealisasi sampai

bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 4.534.531.450 dengan realisasi fisik dari 10 Jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 10 Jenis belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 21.22% dan realisasi keuangan sebesar 21.22%.

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.320.168.400 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 966.605.000 dengan realisasi fisik dari 300 Orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 300 Orang belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 41.66% dan realisasi keuangan sebesar 41.66%.

11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Milik Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.315.597.150 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 377.936.500 dengan realisasi fisik dari 10 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 10 Unit belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 28.73% dan realisasi keuangan sebesar 28.73%.
- b. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.407.891.250 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 3.049.072.649 dengan realisasi fisik dari 439 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 439 Unit belum ada yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 24.57% dan realisasi keuangan sebesar 24.57%.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.082.339.400 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 555.064.500, dengan realisasi fisik dari 6 Bangunan/Gedung yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 6 Bangunan/Gedung yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 26.66% dan realisasi keuangan sebesar 26.66%.

- d. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 5.377.978.316 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 1.024.568.550, dengan realisasi fisik dari 6 Bangunan/Gedung yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 6 Bangunan/Gedung yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 19.05% dan realisasi keuangan sebesar 19.05%.

12. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 10.021.500.500 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 2.997.965.230, dengan realisasi fisik dari 1 Rumah Jabatan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 1 Rumah Jabatan yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 29.92% dan realisasi keuangan sebesar 29.92%.
- b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.855.413.440 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 1.995.982.550, dengan realisasi fisik dari 1 Rumah Jabatan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 1 Rumah Jabatan yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 29.12% dan realisasi keuangan sebesar 29.12%.
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.926.509.930 yang telah terealisasi sampai bulan **Juni** Tahun 2023 sebesar Rp 6.088.406.026, dengan realisasi fisik dari 1 Rumah Dinas yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sampai saat ini 1 Rumah Dinas yang terlaksana sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan **Juni** tahun 2023 sebesar 47.10% dan realisasi keuangan sebesar 47.10%.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi ke 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.13,183,130,900 Menjadi Rp.13.683.130.900 ,Tambahan sebesar Rp.500.000.000, Pemberian bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah Kota Makassar sesuai SK Gubernur Nomor : 602/III/Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023. sampai bulan Juni Tahun 2023 telah melakukan pergeseran anggaran parsial 2 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) dan parsial 3 (BKK) telah terealisasi sebesar Rp 9,054,375,000,- dengan realisasi fisik dari 153 Kelurahan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar 68,68%.
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.6,663,554,800,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah melakukan pergeseran anggaran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) realisasi sampai bulan juni sebesar Rp 1.750,934,200- dengan realisasi fisik dari 153 Kelurahan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 26.% dan realisasi keuangan sebesar 26,40%.
- c. Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2,790,601,400,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 1.387,855,- dengan realisasi fisik dari 15 Kelompok Tekhnologi Tapa Guna yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, untuk sub kegiatan ini telah melakukan pergeseran anggaran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja), realisasi fisik hingga bulan Juni 2023 11 Kelompok sebesar 49% dan realisasi keuangan sebesar 49,73%.

Adapun factor pendukung dari Kegiatan ini yakni Koordinasi dengan para stakeholder dan lembaga kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik demikian pula halnya proses pecairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan semua berjalan lancar atas kerjasama antar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga pada realisasi TW II BPM tertinggi sebesar 46,19% , adapun faktor penghambat dan pencapaian yaitu adanya pergeseran anggran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) dan parsial 3 sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda menunggu setelah semua administrasi selesai.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2023 Triwulan II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	100	Rp 68.638.966.000	100%	Rp 19.956.185.041	100	Rp 23.107.287.100	Rp 23.107.287.100	0	Rp 12.710.290.200	0,00%	55,01%	1	Rp 32.666.475.241	0,20%	47,59%		
				Persentase PKK Aktif	%	100				100			0		0,00%		0		0,00%			
2	13	2,01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan-Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan di 153 Kelurahan	Kelurahan		Rp 68.638.966.000	100%	Rp 19.956.185.041	153	Rp 23.107.287.100	Rp 23.107.287.100	0	Rp 12.710.290.200	0,00%	55,01%	1	Rp 32.666.475.241	0,20%	47,59%	Kasubag Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
12	13	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	153	Rp 51.362.837.500	100%	Rp 10.525.661.364	153	Rp 13.683.130.900	Rp 13.683.130.900	75	Rp 9.046.775.000	49,02%	66,12%	76	Rp 19.572.436.364	15,20%	38,11%	Kasubag Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	153	Rp 15.056.345.500	100%	Rp 6.812.527.552	153	Rp 6.633.554.800	Rp 6.633.554.800	90	Rp 2.321.375.700	58,82%	34,99%	91	Rp 9.133.903.252	18,20%	60,66%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3	13	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kelompok TTG	15	Rp 2.219.783.000	100%	Rp 2.617.996.125	15	Rp 2.790.601.400	Rp 2.790.601.400	9	Rp 1.342.139.500	60,00%	48,09%	10	Rp 3.960.135.625	2,00%	178,40%	Kasubag Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.				
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
2.13 SEKRETARIAT DAERAH																									
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	50	50,00%	150	30,00%	150	30,00%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	Bagian Perencanaan dan Keuangan				
				Indeks Kepuasan Pelayanan yang di Fasilitas dan dilaksanakan oleh sekretariat daerah	%	100	100	100	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Bagian Umum		
				Persentase Pengelolaan BMD dan Aset lainnya yang mendukung produktivitas Sekretariat Daerah	%	100	Rp 741.771.328.001	Rp 172.993.902.214	80	Rp 238.786.117.428	Rp 238.786.117.428	0	Rp 62.682.250.274	0,00%	26,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Bagian Umum
				Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	%	30		30	0			0		0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Bagian Umum
				Persentase penataan organisasi dan ketatalaksanaan	%	100		100	0			0		0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Bagian Organisasi
				Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan	%	100		100%	0,39			0,39		38,71%		0,387		0,08%		0,08%					Bagian Protokol
4	01	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	Rp 2.437.208.896	6	Rp 223.475.991	6	Rp 349.339.000	Rp 349.339.000	3	Rp 79.291.090	50,00%	22,70%	9	Rp 302.767.081	1,80%	12,42%	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	Rp 1.528.705.064	100%	Rp 144.789.141	2	Rp 226.586.200	Rp 226.586.200	1	Rp 68.096.090	50,00%	30,05%	2	Rp 212.885.231	10,00%	13,93%	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	300	Rp 240.296.450	100%	Rp 28.748.000	60	Rp 31.632.500	Rp 31.632.500	0	Rp -	0,00%	0,00%	1	Rp 28.748.000	0,33%	11,96%	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	125	Rp 280.459.598	100%	Rp 15.119.250	25	Rp 23.945.500	Rp 23.945.500	13	Rp 2.400.000	52,00%	10,02%	14	Rp 17.519.250	11,20%	6,25%	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	Rp 223.660.628	100%	Rp 20.103.000	3	Rp 26.246.300	Rp 26.246.300	3	Rp 6.395.000	100,00%	24,37%	4	Rp 26.498.000	26,67%	11,85%	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	Rp 164.087.156	100%	Rp 14.716.600	4	Rp 40.928.500	Rp 40.928.500	2	Rp 2.400.000	50,00%	5,86%	3	Rp 17.116.600	15,00%	10,43%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	90	Rp 220.038.329.127	100	Rp 31.300.477.676	18	Rp 46.947.383.887	Rp 46.947.383.887	8	Rp 15.051.541.281	44,44%	32,06%	108	Rp 46.352.018.957	21,60%	21,07%	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	70	Rp 197.925.982.209	100%	Rp 28.787.185.311	14	Rp 42.912.530.387	Rp 42.912.530.387	7	Rp 13.744.774.143	50,00%	32,03%	8	Rp 42.531.959.454	11,43%	21,49%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	60	Rp 15.323.107.976	100%	Rp 1.605.927.850	12	Rp 2.586.465.000	Rp 2.586.465.000	6	Rp 964.021.601	50,00%	37,27%	7	Rp 2.569.949.451	11,67%	16,77%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persen	100	Rp 3.896.544.708	100%	Rp 631.223.329	100	Rp 908.163.600	Rp 908.163.600	50	Rp 306.745.537	50,00%	33,78%	51	Rp 937.968.866	51,00%	24,07%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	25	Rp 332.414.377	100%	Rp 15.715.050	5	Rp 32.255.200	Rp 32.255.200	5	Rp -	100,00%	0,00%	6	Rp 15.715.050	24,00%	4,73%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	kegiatan	20	Rp 1.408.137.867	100%	Rp 150.235.200	4	Rp 220.721.000	Rp 220.721.000	2	Rp -	50,00%	0,00%	3	Rp 150.235.200	15,00%	10,67%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	Rp 1.152.141.990	100%	Rp 110.190.936	12	Rp 287.248.700	Rp 287.248.700	6	Rp 36.000.000	50,00%	12,53%	7	Rp 146.190.936	11,67%	12,69%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	100	Rp 13.108.524.304	Rp 1.994.696.112	100	Rp 6.856.982.100	Rp 6.856.982.100	0	Rp 2.047.713.300	0,00%	29,86%	0	Rp 4.042.409.412	0,00%	30,84%	30,84%	Bagian Umum			
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	Rp 5.197.737.845	100%	Rp 853.040.112	1	Rp 1.524.840.000	Rp 1.524.840.000	0	Rp 421.500.000	0,00%	27,64%	1	Rp 1.274.540.112	20,00%	24,52%	Bagian Umum		
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	20	Rp 7.910.786.458	100%	Rp 1.141.656.000	4	Rp 5.332.142.100	Rp 5.332.142.100	0	Rp 1.626.213.300	0,00%	30,50%	1	Rp 2.767.869.300	5,00%	34,99%	Bagian Umum		
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Rp 17.343.041.441	Rp 2.607.364.863	100	Rp 4.443.850.000	Rp 4.443.850.000	0	Rp 1.038.212.160	0,00%	23,36%	0	Rp 3.645.577.023	0,00%	21,02%	21,02%	Bagian Umum			
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	10960	Rp 12.182.804.117	97,30%	Rp 2.047.099.250	2192	Rp 2.559.850.000	Rp 2.559.850.000	0	Rp 681.660.000	0,00%	26,63%	1	Rp 2.728.759.250	0,01%	22,40%	Bagian Umum		
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	600	Rp 5.160.237.324	59,16%	Rp 560.265.613	120	Rp 1.884.000.000	Rp 1.884.000.000	40	Rp 356.552.160	33,33%	18,93%	41	Rp 916.817.773	6,77%	17,77%	Bagian Umum		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.	
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	Rp 55.136.744.244	Rp 21.418.909.354	100	Rp 23.049.049.000	Rp 23.049.049.000	0	Rp 6.358.054.086	0,00%	27,58%	0	Rp 27.776.963.440	0,00%	50,38%	Bagian Umum			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	180	Rp 7.407.247.983	100%	Rp 915.240.924	36	Rp 1.151.049.000	Rp 1.151.049.000	0	Rp 391.312.530	0,00%	34,00%	1	Rp 1.306.553.454	0,56%	17,64%	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Unit	4	Rp6.000.000.000	0	Rp695.982.270	0	Rp0	Rp0	0	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Rp 695.982.270	0,00%	11,60%	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10560	Rp 1.417.680.810	100%	Rp 117.990.000	2112	Rp 612.000.000	Rp 612.000.000	1125	Rp 87.480.000	53,27%	14,29%	1126	Rp 205.470.000	10,66%	14,49%	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1000	Rp 33.684.253.234	182%	Rp 18.842.305.135	200	Rp 17.636.000.000	Rp 17.636.000.000	130	Rp 5.777.337.273	65,00%	32,76%	132	Rp 24.619.642.408	13,18%	73,09%	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	705	Rp 7.350.191.700	84,37%	Rp 847.391.025	141	Rp 3.650.000.000	Rp 3.650.000.000	7	Rp 101.924.283	4,96%	2,79%	8	Rp 949.315.308	1,11%	12,92%	Bagian Umum	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Rp 65.100.755.802	Rp 19.972.743.484	100	Rp 42.654.762.863	Rp 42.654.762.863	0	Rp 5.154.262.260	0,00%	12,08%	0	Rp 25.127.005.744	0,00%	38,60%	Bagian Umum		
4	01	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Unit	4	Rp6.000.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Rp -	0	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Rp -	0,00%	0,00%	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	100	Rp 25.040.334.135	100%	Rp 8.945.336.118	0	Rp 30.299.740.000	Rp 30.299.740.000	0	Rp 3.763.600.000	#DIV/0!	12,42%	1	Rp 12.708.936.118	1,00%	50,75%	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	Rp 10.349.399.093	100%	Rp 3.851.517.246	10	Rp 1.436.124.500	Rp 1.436.124.500	0	Rp 617.576.760	0,00%	43,00%	1	Rp 4.469.094.006	2,00%	43,18%	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	85	Rp 23.711.022.574	100%	Rp 7.175.890.120	17	Rp 10.918.898.363	Rp 10.918.898.363	0	Rp 773.085.500	0,00%	7,08%	1	Rp 7.948.975.620	1,18%	33,52%	Bagian Umum	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Rp 98.213.568.416	Rp 27.885.951.164	100	Rp 30.154.344.324	Rp 30.154.344.324	0	Rp 7.637.330.021	0,00%	25,33%	0	Rp 35.523.281.185	0,00%	36,17%	Bagian Umum		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	52500	Rp 31.430.762.212	66,67%	Rp 2.202.031.132	10500	Rp 378.000.000	Rp 378.000.000	2862	Rp 137.500.000	27,26%	36,38%	2863	Rp 2.339.531.132	5,45%	7,44%	Bagian Umum	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	Rp 22.374.492.747	100%	Rp 3.795.355.162	12	Rp 6.084.161.424	Rp 6.084.161.424	6	Rp 1.998.693.571	50,00%	32,85%	7	Rp 5.794.048.733	11,67%	25,90%	Bagian Umum	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	50	Rp 37.751.881.404	90%	Rp 20.005.815.910	10	Rp 21.372.014.500	Rp 21.372.014.500	9	Rp 4.534.531.450	90,00%	21,22%	10	Rp 24.540.347.360	19,80%	65,00%	Bagian Umum	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1500	Rp 6.656.432.054	100%	Rp 1.882.748.960	300	Rp 2.320.168.400	Rp 2.320.168.400	0	Rp 966.605.000	0,00%	41,66%	1	Rp 2.849.353.960	0,07%	42,81%	Bagian Umum	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	Rp 63.346.148.543	Rp 13.116.474.824	100	Rp 24.567.278.244	Rp 24.567.278.244	0	Rp 5.006.642.199	0,00%	20,38%	0	Rp 18.123.117.023	0,00%	28,61%	Bagian Umum		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	50	Rp 4.868.050.982	100%	Rp 885.780.803	10	Rp 1.315.597.150	Rp 1.315.597.150	0	Rp 377.936.500	0,00%	28,73%	1	Rp 1.263.717.303	2,00%	25,96%	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2195	Rp 34.388.194.351	42,14%	Rp 6.493.227.919	439	Rp 12.407.891.250	Rp 12.407.891.250	0	Rp 3.049.072.649	0,00%	24,57%	0	Rp 9.542.300.568	0,02%	27,75%	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	gedung kantor	15	Rp279.568.660	97,00%	Rp96.700.000	0	Rp0	Rp0	0	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Rp 96.700.000	6,47%	34,57%	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	Rp 6.422.271.900	100%	Rp 1.181.532.876	6	Rp 2.082.339.400	Rp 2.082.339.400	0	Rp 555.064.500	0,00%	26,66%	1	Rp 1.736.597.376	3,33%	27,04%	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	Rp 17.387.943.651	100%	Rp 4.459.233.226	6	Rp 8.761.450.444	Rp 8.761.450.444	0	Rp 1.024.568.550	0,00%	11,69%	1	Rp 5.483.801.776	3,33%	31,54%	Bagian Umum	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	Rp 19.329.493.859	Rp 2.462.822.288	100	Rp 3.464.128.720	Rp 3.464.128.720	50	Rp 927.679.184	50,00%	26,78%	150	Rp 3.390.501.472	30,00%	17,54%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	60	Rp 981.983.374	100%	Rp 175.856.988	14	Rp 184.128.720	Rp 184.128.720	7	Rp 100.957.184	50,00%	54,83%	8	Rp 276.814.172	13,33%	28,19%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	40	Rp 447.500.256	100%	Rp -	8	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	0	Rp -	0,00%	0,00%	1	Rp -	2,50%	0,00%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	60	Rp 17.900.010.229	100%	Rp 2.286.965.300	12	Rp 3.200.000.000	Rp 3.200.000.000	6	Rp 826.722.000	50,00%	25,84%	7	Rp 3.113.687.300	11,67%	17,39%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K			Rp.		
4	01	2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	Rp 44.928.551.976	100	Rp 27.828.564.855	100	Rp 29.803.423.870	Rp 29.803.423.870	50	Rp 11.082.353.806	50,00%	37,18%	150	Rp 38.910.918.661	30,00%	86,61%	Bagian Umum		
4	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	5	Rp 26.805.879.653	100%	Rp 7.538.458.775	1	Rp 10.021.500.500	Rp 10.021.500.500	1	Rp 2.997.965.230	50,00%	29,92%	2	Rp 10.536.424.005	30,00%	39,31%	Bagian Umum	
4	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	5	Rp 10.829.898.229	100%	Rp 4.264.126.823	1	Rp 6.855.413.440	Rp 6.855.413.440	1	Rp 1.995.982.550	50,00%	29,12%	2	Rp 6.260.109.373	30,00%	57,80%	Bagian Umum	
4	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	5	Rp 7.292.774.094	100%	Rp 16.025.979.257	1	Rp 12.926.509.930	Rp 12.926.509.930	1	Rp 6.088.406.026	50,00%	47,10%	2	Rp 22.114.385.283	30,00%	303,24%	Bagian Umum	
4	01	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi		60	Rp 12.167.597.960	12	Rp 2.116.933.308	12	Rp 2.931.674.800	Rp 2.931.674.800	5	Rp 596.429.147	41,67%	20,34%	17	Rp 2.713.362.455	3,40%	22,30%	Bagian Organisasi	
4	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	25	Rp 2.806.528.060	5	Rp 501.081.319	5	Rp 690.601.800	Rp 690.601.800	1	Rp 108.559.462	20,00%	15,72%	6	Rp 609.640.781	24,00%	21,72%	Bagian Organisasi	
4	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	25	Rp 6.540.167.013	5	Rp 1.122.918.942	5	Rp 1.526.698.900	Rp 1.526.698.900	3	Rp 359.230.485	60,00%	23,53%	8	Rp 1.482.149.427	32,00%	22,66%	Bagian Organisasi	
4	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	Rp 2.820.902.887	2	Rp 492.933.047	2	Rp 714.374.100	Rp 714.374.100	1	Rp 128.639.200	50,00%	18,01%	3	Rp 621.572.247	30,00%	22,03%	Bagian Organisasi	
4	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelayanan Fasilitas Keprotokoleraan dan Dokumentasi Pimpinan Pemerintahan Kota Makassar	Pelayanan	5800	Rp 130.621.363.433	1108	Rp 22.065.488.295	1160	Rp 23.563.900.620	Rp 23.563.900.620	449	Rp 7.702.741.740	38,71%	32,69%	1557	Rp 29.768.230.035	311,40%	22,79%	Bagian Protokol	
4	01	2.14	01	Fasilitas Keprotokoleraan	Jumlah Pelayanan Fasilitas Keprotokoleraan Pemerintah Kota Makassar yang mendapat Layanan Keprotokoleraan	Pelayanan	4200	Rp 58.684.312.310	797	Rp 10.767.137.207	840	Rp 12.890.143.120	Rp 12.890.143.120	333	Rp 4.104.046.740	39,64%	31,84%	1130	Rp 14.871.183.947	26,90%	25,34%	Bagian Protokol	
4	01	2.14	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang Dilaksanakan	Pelayanan	1600	Rp 2.418.469.263	311	Rp 429.900.896	320	Rp 442.470.700	Rp 442.470.700	116	Rp 200.190.000	36,25%	45,24%	427	Rp 630.090.896	26,69%	26,05%	Bagian Protokol	
4	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	1200	Rp 69.518.581.860	217	Rp 10.868.450.192	240	Rp 10.231.286.800	Rp 10.231.286.800	97	Rp 3.398.505.000	40,42%	33,22%	314	Rp 14.266.955.192	26,17%	20,52%	Bagian Protokol	
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Kegamaan	%	100				100			0		0,00%		0		0,00%		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	-	Sangat Tinggi	Rp 128.007.986.300	100	Rp 73.141.543.923	Sangat Tinggi	Rp 82.231.756.116	Rp 87.066.728.500	8	Rp 33.511.437.889	#VALUE!	40,75%	108	Rp 106.652.981.812	#VALUE!	83,32%	Bagian Tata Pemerintahan	
					Cakupan Produk Hukum Daerah	%	100				100			7		666,67%		84		84,17%		Bagian Hukum	
					Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Direalisasikan	%	100				90			0		0,00%		0		0,00%		Bagian Kerjasama	
4	01	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	%	100	Rp 15.135.213.300	100	Rp 8.671.229.500	100	Rp 8.671.229.500	Rp 8.671.229.500	0	Rp 3.602.857.238	0,00%	41,55%	100	Rp 12.274.086.738	20,00%	81,10%	Bagian Tapem	
4	01	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	30	Rp 2.789.691.000	5	Rp 281.524.200	2	Rp 281.524.200	Rp 281.524.200	1	Rp 69.240.000	50,00%	24,59%	6	Rp 350.764.200	20,00%	12,57%	Bagian Tapem	
4	01	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	30	Rp 7.401.637.000	5	Rp 4.256.149.500	4	Rp 4.256.149.500	Rp 4.256.149.500	3	Rp 912.250.000	75,00%	21,43%	8	Rp 5.168.399.500	26,67%	69,83%	Bagian Tapem	
4	01	2.01	03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	30	Rp 4.943.885.300	5	Rp 4.133.555.800	6	Rp 4.133.555.800	Rp 4.133.555.800	4	Rp 2.621.367.238	66,67%	63,42%	9	Rp 6.754.923.038	30,00%	136,63%	Bagian Tapem	
4	01	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	50	Rp 67.040.794.200	Rp 54.275.636.545	27	Rp 60.850.036.300	Rp 60.850.036.300	0	Rp 28.221.492.680	0,00%	46,38%	0	Rp 82.497.129.225	0,00%	123,06%	Bagian Kesra		
4	01	2.02	01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	Kegiatan	100	Rp 61.547.841.200	93,18	Rp 53.700.755.595	22	Rp 59.800.360.400	Rp 59.800.360.400	18	Rp 28.063.002.680	81,82%	46,93%	111	Rp 81.763.758.275	111,18%	132,85%	Bagian Kesra	
4	01	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Kebijakan	25	Rp 2.831.939.200	79,94	Rp 423.016.734	5	Rp 556.359.700	Rp 556.359.700	0	Rp 90.990.000	0,00%	16,35%	80	Rp 514.006.734	319,76%	18,15%	Bagian Kesra	
4	01	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan	25	Rp 2.661.013.800	32,14	Rp 151.864.216	5	Rp 493.316.200	Rp 493.316.200	0	Rp 67.500.000	0,00%	13,68%	32	Rp 219.364.216	128,56%	8,24%	Bagian Kesra	
4	01	2.03		Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah	Persen	100	Rp 21.833.390.800	77,5	Rp 2.649.222.810	100	Rp 4.516.387.300	Rp 4.516.387.300	7	Rp 1.018.159.460	6,67%	22,54%	84	Rp 3.667.382.270	16,83%	16,80%	Bagian Hukum	
4	01	2.03	01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500	Rp 8.272.465.200	77,5	Rp 1.201.910.188	120	Rp 1.287.807.200	Rp 1.287.807.200	8	Rp 392.402.179	6,67%	30,47%	86	Rp 1.594.312.367	17,10%	19,27%	Bagian Hukum	
4	01	2.03	02	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	60	Rp 7.525.344.800	100	Rp 900.181.588	12	Rp 2.291.960.100	Rp 2.291.960.100	3	Rp 377.286.504	25,00%	16,46%	103	Rp 1.277.468.092	171,67%	16,98%	Bagian Hukum	
4	01	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	500	Rp 6.035.580.800	77,5	Rp 547.131.034	120	Rp 936.620.000	Rp 936.620.000	8	Rp 248.470.777	6,67%	26,53%	86	Rp 795.601.811	17,10%	13,18%	Bagian Hukum	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.			
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	%	100	Rp 23.998.588.000	100	Rp 7.545.455.068	100	Rp 8.194.103.016	Rp 13.029.075.400	0	Rp 668.928.511	0,00%	8,16%	100	Rp 8.214.383.579	20,00%	34,23%	Bagian KerjaSama		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang di tanda tangani	Dokumen Kerjasama	100		100		20		32		160,00%		132		132,00%	35,18%	Bagian KerjaSama		
					Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang mempunyai rekomendasi dari Tim Koordinasi	Dokumen Kerjasama	100	Rp 10.570.358.800		Rp 3.301.761.516	20	Rp 3.301.761.516	Rp 8.136.733.900	0	Rp 417.058.423	0,00%	5,13%	0	Rp 3.718.819.939	0,00%		Bagian KerjaSama		
					Jumlah Kespakatan Kerjasama yang tercapai	Dokumen Kerjasama	100				20			32		160,00%		32		32,00%		Bagian KerjaSama		
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Forum Investasi Luar Negeri	Forum Kerjasama	5		1		1		0		0,00%		1		20,00%		Bagian KerjaSama		
					Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri	Dokumen Kerjasama	5	Rp 9.554.196.700		Rp 3.865.264.431	2	Rp 4.137.353.400	Rp 4.137.353.400	0	Rp 151.570.088	0,00%	3,66%	0	Rp 4.016.834.519	0,00%	42,04%		Bagian KerjaSama	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	Laporan	5				1			0		0,00%		0		0,00%		Bagian KerjaSama		
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Buku Potensi Kerjasama	Exemplar	500		80		100		0		0,00%		80		16,00%		Bagian KerjaSama		
					Jumlah Laporan dan Data Kerjasama secara berkala yang di dokumentasikan	Laporan	5	Rp 3.874.032.500		Rp 378.429.121	1	Rp 754.988.100	Rp 754.988.100	0	Rp 100.300.000	0,00%	13,28%	0	Rp 478.729.121	0,00%	12,36%		Bagian KerjaSama	
					Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	laporan	5				1			0		0,00%		0		0,00%		Bagian KerjaSama		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik	%	100			100			50		50,00%		50		10,00%		Bagian Perekonomian		
					Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kwartal pertama	%	20				100			0		0,00%		0		0,00%		Bagian BPBJ		
					Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	Rp 57.428.666.000		Rp 8.037.461.750	100	Rp 13.565.404.100	Rp 13.565.404.100	0	Rp 2.024.123.439	0,00%	14,92%	0	Rp 10.061.585.189	0,00%	17,52%		Bagian BPBJ	
					Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring Tim Evaluasi pengawasan realisasi anggaran (SISMONTEPRA)	%	100		82,39		100			24		23,93%		106		21,26%		Bagian Adpem		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik	%	100	Rp 18.932.325.320	100	Rp 2.769.784.457	100	Rp 4.503.633.200	Rp 4.503.633.200	0	Rp 457.772.789	0,00%	10,16%	100	Rp 3.227.557.246	20,00%	17,05%	Bagian Perekonomian	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan kinerja manajemen dan keuangan BUMD dan BLUD	Laporan	130			26			6		23,08%		62		47,80%		Bagian Perekonomian		
					Jumlah pelaksanaan Kegiatan Asessment BUMD dan BLUD	Kegiatan	10				2			0		0,00%		0		0,00%		Bagian Perekonomian		
					Jumlah rapat koordinasi khusus/sosialisasi/workshop/FGD/bintek lingkup BUMD dan BLUD Kota Makassar	Kali	20	Rp 13.389.499.320	56,14	Rp 1.812.181.701	4	Rp 3.160.532.000	Rp 3.160.532.000	2	Rp 212.953.289	50,00%	6,74%	2	Rp 2.025.134.990	10,00%	15,12%		Bagian Perekonomian	
					Tersusunnya Dokumen Bisnis Plan dan corporate plan/RKAP BUMD dan BLUDD	Dokumen	60				12			6		50,00%		6		10,00%		Bagian Perekonomian		
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan sosialisasi/FGD terkait pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kegiatan	10			2			1		50,00%		69		692,30%		Bagian Perekonomian		
					Jumlah laporan informasi dan Rekomendasi Distribusi dan Pengendalian Perekonomian	Laporan	10	Rp 2.635.555.000	68,23	Rp 472.495.075	2	Rp 641.607.400	Rp 641.607.400	0	Rp 122.897.500	0,00%	19,15%	0	Rp 595.392.575	0,00%	22,59%		Bagian Perekonomian	
					Jumlah Rapat koordinasi pengendalian Inflasi Daerah	Kali	20				4			2		50,00%		2		10,00%			Bagian Perekonomian	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan informasi dan rekomendasi terkait perencanaan dan pengawasan usaha Mikro Kecil	Laporan	10	Rp 2.907.271.000	64,84	Rp 485.107.681	2	Rp 701.493.800	Rp 701.493.800	0	Rp 121.922.000	0,00%	17,38%	65	Rp 607.029.681	648,40%	20,88%	Bagian Perekonomian	
					Jumlah Peserta yang di Edukasi	Orang	900				180			90		50,00%		90		10,00%		Bagian Perekonomian		
					Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	20				4			2		50,00%		2		10,00%		Bagian Perekonomian		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENIA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENIA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENIA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENIA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENIA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENIA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
4	01	03	2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase penyerapan realisasi anggaran melalui SISMONTEPRA	%	90	Rp 5.992.390.400	82,39	Rp 994.618.822	90	Rp 3.062.315.700	Rp 3.062.315.700	24	Rp 2.857.625.800	26,59%	99,32%	106	Rp 3.792.244.622	21,26%	63,28%	Bagian Adpem		
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi	Dokumen	5	Rp 1.661.504.400	1	Rp 358.926.954	1	Rp 2.143.773.500	Rp 2.143.773.500	1	Rp 59.278.000	100,00%	2,77%	2	Rp 418.204.954	40,00%	25,17%	Bagian Adpem	
					Jumlah CSR yang di fasilitasi	Dokumen	5		0					0	#DIV/0!		0			0,00%				
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi	Dokumen	5	Rp 2.147.490.000	1	Rp 300.654.958	1	Rp 463.975.600	Rp 463.975.600	0	Rp 113.589.200	0,00%	24,48%	1	Rp 414.244.158	20,00%	19,29%	Bagian Adpem	
					Jumlah SKPD yang mendapatkan DAK	Dokumen	5							0	#DIV/0!		0			0,00%				
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi sismontepra tepat waktu	Persen	100	Rp 2.183.396.000	100%	Rp 275.036.910	100	Rp 454.566.600	Rp 454.566.600	50	Rp 102.208.300	50,00%	22,48%	51	Rp 377.245.210	51,00%	17,28%	Bagian Adpem	
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level	3	Rp 32.509.950.280	1	Rp 4.333.058.471	3	Rp 5.999.455.200	Rp 5.999.455.200	2	Rp 1.291.275.150	66,67%	21,52%	3	Rp 5.624.333.621	0,60%	17,30%	Bagian BPBJ	
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilayani	Paket	1000	Rp 11.063.683.200	286	Rp 1.646.434.202	200	Rp 2.395.948.000	Rp 2.395.948.000	72	Rp 617.563.150	36,00%	25,78%	358	Rp 2.263.997.352	35,80%	20,46%	Bagian BPBJ	
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah fungsi pengelolaan layanan Pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan	Fungsi Layanan	35	Rp 7.663.192.080	35	Rp 1.187.220.534	7	Rp 1.703.506.400	Rp 1.703.506.400	6	Rp 175.226.100	85,71%	10,29%	41	Rp 1.362.446.634	117,14%	17,78%	Bagian BPBJ	
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis / Sosialisasi yang dilaksanakan, Jumlah SKPD Yang mendapatkan Pendampingan Barang dan jasa	Kegiatan dan SKPD	30 dan 172	Rp 13.777.075.000	6	Rp 1.499.403.735	6	Rp 1.900.000.800	Rp 1.900.000.800	6	Rp 498.485.900	100,00%	26,24%	12	Rp 1.997.889.635	#VALUE!	14,50%	Bagian BPBJ	

Makassar, Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



Ir.M.Ansar, MSI

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19630517 199203 1 004